

LESSON LEARNED

KOTAKU SUMBAWA 2022

 [Kotaku.pu.go.id](https://kotaku.pu.go.id)

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wa Barakatuh

Kotaku merupakan program strategis yang memiliki sasaran pengentasan permukiman kumuh perkotaan melalui peningkatan akses terhadap infrastruktur pada pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan keberlanjutan. Manfaat dari program kotaku adalah bertambahnya akses masyarakat terhadap infrastruktur dan pelayanan perkotaan pada kawasan kumuh, antara lain : drainase; air bersih/minum, aksesibilitas, pengelolaan persampahan; pengelolaan air limbah, pengamanan kebakaran, ruang terbuka hijau /public.

Dengan program ini luas kawasan kumuh diharapkan terus berkurang. Arah kebijakan pembangunan Direktorat Jendral Cipta Karya adalah membangun system, memfasilitasi pemerintah daerah, memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas). Program kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Melalui program Kotaku beserta pelaksana lapangan dan masyarakat berada di garda depan pengentasan permukiman kumuh di perkotaan. Lebih dari itu, kami berharap program ini dapat memberikan cerita dan kenangan baik bagi masyarakat yang tinggal di wilayah tersebut. Sebuah makna yang menjadi bagian dari kesehatan dan cerita hidup KOTAKU

MENGALIRKAN HARAPAN MERAWAT MASA DEPAN ini mengolaborasikan caoain kami dalam upaya pengentasan permukiman kumuh di perkotaan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Selamat membaca,

***Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Kabupaten Sumbawa***

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Mengenai Kotaku	1
7+1 Indikator Kekumuhan	2
Permukiman Kumuh	4
Progres Capaian Pengurangan Kumuh	5
Kabupaten Sumbawa	5
Realisasi Pendanaan Program 2017– 2021	6
Kabupaten Sumbawa	6
Inovasi Penataan	7
Bantaran Sungai Samapu	7
Gambaran Umum Kelurahan Samapu	7
Karakteristik Permukiman Kawasan Bantaran Sungai	9
Langkah Sosialisasi Edukasi Dan Advokasi	12
Inovasi Penataan Permukiman Bantaran Sungai Kelurahan Samapu	15
Program Kotaku Sumbawa Gelar Kegiatan KbiK	19
Pemkab Usulkan Pulau Bungin Sebagai Lokasi DAK Integrasi	22
Pokja PKP Sumbawa Gelar Rakor Bersama Bppw Ntb Bahas Rencana Kerja Tahun 2022 Dan Sk Forum PKP	24
Pemkab Sumbawa Launching Action Fisik Program Kotaku 2021	27
Optimalkan Kesejahteraan Masyarakat Terdampak Pandemi Covid-19 Melalui Kegiatan Padat Karya Tunai	30
Perencanaan Teknis Program Kotaku Sumbawa Berjalan Lancar	33

Lebih Hidup Diskusi Tematik, Webinar Kotaku Sumbawa	37
---	----

MENGENAL KOTAKU

Kotaku adalah salah satu dari sejumlah upaya strategis untuk mendukung Gerakan Nasional 100-0-100 dengan mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia. Arah kebijakan pembangunan Dirjen Cipta Karya adalah membangun sistem, memfasilitasi pemerintah daerah, dan memfasilitasi komunitas (berbasis komunitas).

Program Kotaku akan menangani kumuh dengan membangun platform kolaborasi melalui peningkatan peran pemerintah daerah dan partisipasi masyarakat. Kegiatan penanganan kumuh ini meliputi pembangunan infrastruktur serta pendampingan sosial dan ekonomi untuk keberlanjutan kehidupan masyarakat yang lebih baik di lokasi permukiman kumuh.

KOTAKU SUMBAWA.

Tahapan pelaksanaan Program Kotaku diawali dengan pendataan kondisi awal desa/kelurahan masing-masing melalui 7+1 indikator kumuh oleh lembaga masyarakat yang bernama Badan/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (BKM/LKM).

Data tersebut diintegrasikan antara dokumen perencanaan masyarakat dan dokumen perencanaan kabupaten/kota untuk menentukan kegiatan prioritas mengurangi permukiman kumuh dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru.

7+1 INDIKATOR KEKUMUHAN

Bangunan Gedung



- Ketidakteraturan dalam hal dimensi, orientasi, dan bentuk
- Kepadatan tinggi tidak sesuai dengan ketentuan dalam- rencana tata ruang

Jalan Lingkungan



- Kondisi permukaan jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan dengan aman dan nyaman
- Lebar jalan yang tidak memadai
- Kelengkapan jalan yang tidak memadai.

Penyediaan Air Minum



- Ketidaktersediaan akses air minum
- Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu
- Tidak terpenuhinya kualitas air minum sesuai standar kesehatan.

Pengelolaan Air Limbah



- Ketidaktersediaan sistem pengelolaan air limbah
- Ketidaktersediaan kualitas buangan sesuai standar yang berlaku
- Tercemarnya lingkungan sekitar

- Ketidaktersediaan sistem pengamanan secara aktif dan pasif
- Ketidaktersediaan pasokan air untuk pemadaman yang memadai
- Ketidaktersediaan akses untuk mobil pemadam kebakaran

Pengamanan Kebakaran



- Ketidaktersediaan sistem pengelolaan persampahan
- Ketidaktersediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan
- Percemarnya lingkungan sekitar oleh sampah

Pengelolaan Persampahan



- Ketidakmampuan mengalirkan limpasan air hujan
- Menimbulkan bau
- Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan

Drainase Lingkungan



- Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka hijau (RTH)
- Ketidaktersediaan lahan untuk ruang terbuka non-hijau

Ruang Terbuka Publik



PERMUKIMAN KUMUH

Timbulnya Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai akibat dari urbanisasi. Muncul permukiman kumuh dapat merusak citra wilayah sebagai lokasi destinasi wisata.

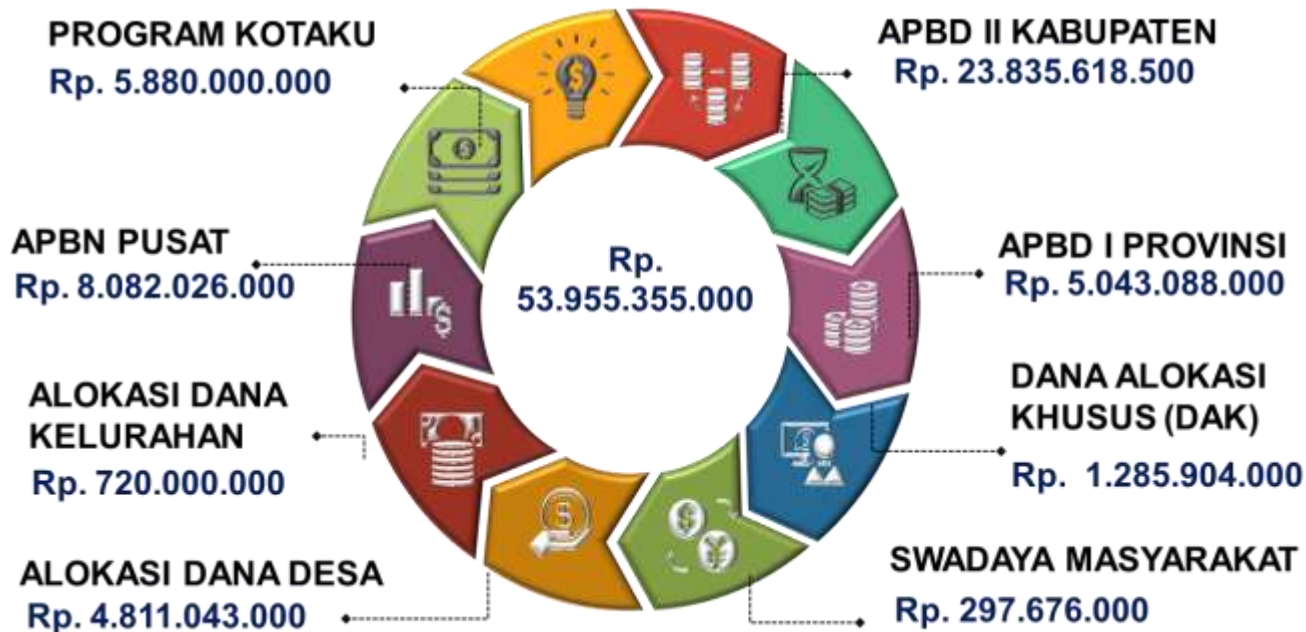
Salah satu titik lokasi munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa yaitu di kawasan bantaran sungai, ini disebabkan karena kurangnya lahan untuk bermukim dan mahalnya harga lahan di perkotaan. Dampak dari adanya permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai yaitu merusak keindahan kota dan disfungsi sungai.

Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) adalah satu dari sejumlah upaya strategis Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mempercepat penanganan permukiman kumuh di Indonesia . Visi ini dituangkan ke dalam Gerakan 100-0-100, yaitu 100 persen akses universal air minum , 0 persen permukiman kumuh , dan 100 persen akses sanitasi layak. Aspek yang ditangani antara lain pembangunan infrastruktur jalan , Drainase Lingkungan, Sanitasi Lingkungan, ruang terbuka hijau , sarana pengelolaan sampah, hingga fasilitas Penyediaan air bersih . Dengan pendekatan ini, diharapkan KOTAKU dapat meningkatkan kualitas hidup warga Sumbawa menjadi lebih baik.

PROGRES CAPIAN PENGURANGAN KUMUH KABUPATEN SUMBAWA



REALISASI PENDANAN PROGRAM 2017– 2021 KABUPATEN SUMBAWA



INOVASI PENATAAN BANTARAN SUNGAI SAMAPUIN

Permukiman kumuh merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah sebagai akibat dari urbanisasi. Munculnya permukiman kumuh dapat merusak citra wilayah sebagai lokasi destinasi wisata.

Salah satu titik lokasi munculnya permukiman kumuh di Kabupaten Sumbawa yaitu di kawasan bantaran sungai Kelurahan Samapuin, ini disebabkan karena kurangnya lahan untuk bermukim dan mahal nya harga lahan di perkotaan. Dampak dari adanya permukiman kumuh di kawasan bantaran sungai yaitu merusak keindahan kota dan disfungsi sungai.

GAMBARAN UMUM KELURAHAN SAMAPUIN

Kelurahan Samapuin berada di Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa dan termasuk wilayah perkotaan Sumbawa, yang terletak pada posisi 117.420841 Bujur Timur dan -8.493564 Lintang Selatan. Luas Wilayah sebesar **± 189,7 Ha** Terdiri dari 6 Lingkungan (RW001, RW002, RW003, RW004, RW005, RW006).

Luasan Kumuh Awal berdasarkan SK No. 904 tahun 2016 sebesar 11.11 Ha tersebar di 6 RT 3 RW di Kelurahan Samapuin.

Secara Administrasi Kelurahan Samapuin memiliki Batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kelurahan Brangbara

Sebelah Barat : Kelurahan Brangbara

Sebelah Selatan : Desa Pungka dan Desa Jorok

Sebelah Timur : Pekat



Peta Administrasi Kelurahan Samapuin

KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KAWASAN BANTARAN SUNGAI



- ✓ Penggunaan Lahan di dominasi oleh permukiman
- ✓ Kerapatan bangunan sangat tinggi
- ✓ Orientasi rumah membelakangi sungai
- ✓ Kondisi jalan dengan jenis tanah, ketika musim hujan jalan menjadi becek
- ✓ Tidak tersedianya saluran Drainase
- ✓ Minimnya Ruang Terbuka Hijau
- ✓ Kondisi sanitasi yang buruk
- ✓ Bantaran sungai dijadikan

tempat pembuangan sampah oleh warga





Permukiman kumuh Bantaran sungai memiliki karakteristik bangunan yang padat dan tidak teratur, rumah yang tidak layak huni, akses jalan yang buruk, sanitasi yang buruk, sistem drainase yang buruk dan minimnya ruang terbuka hijau. Hal ini juga berlaku untuk areal dan permukiman bantaran sungai di kelurahan Samapuin Kabupaten Sumbawa, yang memiliki karakteristik kondisi bangunan

hunian masih membelakangi sungai, kondisi utilitas sanitasi dan persampahan yang masih buruk serta bantaran dimanfaatkan sebagai tempat memelihara hewan ternak seperti kuda dan ternak lainnya. Karakteristik dari aspek non fisik seperti Mata pencaharian penduduk (tingkat pendapatan), tingkat pendidikan masyarakat di bantaran sungai samapuin masih rendah.



LESSON LEARNED :

1. Permasalahan dominan pada kawasan permukiman bantaran sungai didominasi oleh aspek lingkungan, diikuti oleh aspek visual, perilaku warga dan regulasi
2. Dampak dari Urbanisasi menyebabkan munculnya permukiman kumuh yang dapat merusak citra suatu wilayah

LANGKAH SOSIALISASI EDUKASI DAN ADVOKASI



Salah satu Langkah awal membangun kolaborasi untuk memberikan pemahaman tentang urgensi penanganan kumuh di suatu wilayah adalah melalui advokasi, edukasi, juga sosialisasi program/kegiatan ke para pemangku kepentingan dari tingkat kabupaten sampai tingkat kelurahan. Sosialisasi, edukasi dan advokasi merupakan bagian yang terpenting dalam keberhasilan program KOTAKU dalam penataan dan peningkatan kualitas lingkungan yang berkelanjutan.

Strategi sosialisasi, edukasi dan advokasi dilakukan melalui teknologi informasi, pemanfaatan media massa, kerjasama dengan Kelompok Sosial, pemanfaatan aktifitas sosial budaya, pembentukan relawan, serta pemanfaatan media sosial. Berikut Langkah-langkah sosialisasi, edukasi dan advokasi yang dilakukan untuk rencana penataan Kawasan bantaran sungai di Kelurahan Samapu:

1. Pendekatan terhadap masyarakat merupakan langkah awal untuk menggali dan menumbuhkan motivasi masyarakat untuk berperan aktif



dalam proses penataan dan peningkatan kualitas lingkungan, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian.

2. Penyamaan Persepsi dengan stakeholder mulai dari tingkat Kabupaten terutama dengan Pokja yang menangani Kawasan permukiman untuk mengintegrasikan perencanaan sampai ke tingkat kelurahan.
3. Koordinasi dengan pemerintah Kelurahan, Tokoh Masyarakat, serta kelompok sosial di Kelurahan Samapuin.



4. Peningkatan Kapasitas Masyarakat, BKM dan KPP (Pelatihan Vocational pemanfaatan sampah menjadi kerajinan),
5. Sosialisasi dan edukasi masyarakat melalui Media Cetak seperti Banner/Spanduk tentang pentingnya perilaku hidup bersih dan sehat.
6. Mengadvokasi lurah, BKM dan masyarakat dalam membuat regulasi tingkat kelurahan, seperti awik-awik/aturan Bersama dalam penataan bantaran sungai dan pemeliharaan pasca RTH dan Infrastruktur terbangun.

LESSON LEARNED :

1. Peningkatan kapasitas masyarakat bisa mengedukasi kelompok perempuan untuk berkarya dalam mengolah sampah menjadi kerajinan yang bernilai ekonomis.
2. Peran stakeholder /Pokja PKP sangat penting dalam mensosialisasikan, mengedukasi dan membuat regulasi penataan bantaran sungai.

INOVASI PENATAAN PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI KELURAHAN SAMAPUIN



“MEWUJUDKAN KAWASAN BANTARAN SUNGAI SAMAPUIN SEBAGAI RUANG TERBUKA PUBLIK YANG TERINTEGRASI DAN BERKELANJUTAN”

1. Penataan Dan Pengembangan Kawasan Permukiman Yang Layak Huni dan Sehat
2. Pembuatan IPAL sebagai sarana pengolahan air limbah rumah tangga
3. Meningkatkan Akses Dan Pergerakan Pada Kawasan Kurang Berkembang Dengan Fungsi Permukiman
4. Meningkatkan Sarana prasarana sebagai tempat pertemuan dan lokasi bermain anak
5. Peningkatan Ekonomi Melalui penyediaan lapak kuliner
6. Pembentukan Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara

Pekerjaan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Samapuin ini mencakup perbaikan jalan lingkungan sepanjang 197 Meter, pembangunan sanitasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 3 Unit, drainase lingkungan 180 Meter, Pembangunan jamban 10 Unit serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Bruga, pot bunga, hingga fasilitas penerangan. Program penataan kawasan kumuh ini menghabiskan anggaran mencapai Rp.500.000.000, ditambah dengan kolaborasi dari APBD Kabupaten untuk pembangunan jalan paving block di sepanjang bantaran sungai Kelurahan Samapuin.





Pekerjaan penataan kawasan kumuh di Kelurahan Samapuini ini mencakup perbaikan jalan lingkungan sepanjang 197 Meter, pembangunan sanitasi instalasi pengolahan air limbah (IPAL) 3 Unit, drainase lingkungan 180 Meter, Pembangunan jamban 10 Unit serta pembangunan ruang terbuka hijau (RTH) yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung seperti Bruga, pot bunga, hingga fasilitas penerangan. Program penataan kawasan kumuh ini menghabiskan anggaran mencapai Rp.500.000.000, ditambah dengan kolaborasi dari APBD Kabupaten untuk pembangunan jalan paving block di sepanjang bantaran sungai Kelurahan Samapuini.

Kawasan bantaran sungai kelurahan samapuini sekarang bisa difungsikan sebagai tempat pertemuan dan tempat bermain anak ini sesuai dengan tujuan untuk mengoptimalkan hasil pembangunan yang bisa dirasakan oleh masyarakat.

LESSON LEARNED :

1. Pelibatan masyarakat dalam setiap kegiatan menjadi kunci dalam penanganan Kawasan kumuh bantaran sungai kelurahan samapuin
2. Peran dan partisipasi masyarakat dapat meminimalisir gejolak yang akan muncul di masyarakat pada saat pelaksanaan program.
3. Penataan Bantaran Sungai melalui program KOTAKU secara langsung merubah wajah permukiman kumuh menjadi ruang terbuka hijau yang memiliki utilitas sanitasi dan persampahan yang layak.

PROGRAM KOTAKU SUMBAWA GELAR KEGIATAN KBIK

Sumbawa (postkotantb.com)- Pasca ditarik kembali seluruh Fasilitator Program KOTAKU di NTB dari Rekompak beberapa waktu yang lalu. Kini Fasilitator aktif kembali melanjutkan seluruh kegiatan yang belum tuntas di tahun 2018 kemarin.



Melalui kegiatan KBIK (Komunitas Belajar Internal Konsultan) mereflash kembali ingatan teman-teman fasilitator karena selama lebih kurang 7-8 bulan diperbantukan di kegiatan Rehab Rekon melalui metode Rekompak. Sebagai langkah awal teman-teman fasilitator saat ini agar fokus melakukan identifikasi kegiatan kolaborasi yang sudah di lakukan tahun 2018 dan yang tidak kalah penting melakukan review atau

penyempurnaan dokumen perencanaan yang sudah ada agar menjadi lebih baik dan sempurna.

Demikian disampaikan Nurhadi dalam memberikan sambutan dan arahannya dalam kegiatan KBIK selaku Team Leader yang didampingi Subagyo Sasmito Raharjo sebagai TA Infrastruktur, Akhmad

Rumnatandi sebagai TA Monev, Khaeri Sadikin sebagai TA Kolaborasi OSP 5 NTB, Serta Askot Mandiri Kabupaten Sumbawa Yanis Mayadi.

Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa Burhanuddin, dalam arahannya saat membuka kegiatan KBIK Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) menyampaikan apresiasi yang sangat luar biasa kepada seluruh fasilitator KOTAKU di Kabupaten Sumbawa, karena sudah membantu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dalam menuntaskan Kumuh di kabupaten Sumbawa melalui Program 100-0-100. Kami ingin bermitra dengan baik dengan teman-teman KOTAKU dalam mengawal program Pemerintah khususnya dalam menuntaskan kumuh di Kabupaten Sumbawa. Kami Dinas PRKP sangat membuka diri kepada teman-teman KOTAKU Sumbawa untuk kita berkolaborasi dan jika ada yang semestinya dibutuhkan sebagai bentuk dukungan Pemda, kami siap membantu" ungkapnya.

Dalam pemaparannya, Subagyo Sasmito Raharjo yang akrab disapa Sas ini menyampaikan bahwa dalam jangka waktu sebulan kedepan meminta kepada teman-teman fasilitator agar focus untuk melakukan review dokumen RPLP (Rencana Penataan Lingkungan Permukiman) dan Dokumen DED (Detail Engineering Design) supaya menjadi sebuah dokumen yang berkualitas. Ditambahkan TA Monev Rum agar apa yang menjadi target program dapat dicapai. Terutama dalam inputan Data SIM dan QS agar bisa di lakukan croos cek kembali. Terakhir TA Kolaborasi Heri Sadikin menyampaikan agar

melakukan pengecekan ulang secara menyeluruh terhadap kegiatan Kolaborasi yang sudah dilaksanakan baik di tahun 2018 maupun di tahun 2019 ini.

Di akhir kegiatan Yanis selaku Askot Mandiri Kabupaten Sumbawa menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada TIM OSP 5 NTB yang sudah sempat hadir dan meluangkan waktu untuk menghadiri Kegiatan KBIK di Kabupaten Sumbawa. Kegiatan KBIK ini di akhiri dengan Acara Buka Puasa Bersama yang di gelar di Hotel Transit Sumbawa. (Ari)

LESSON LEARNED :

1. *Kegiatan KBIK (Komunitas Belajar Internal Konsultan) merupakan salah satu Langkah dalam rangka mereflash kembali ingatan tim fasilitator.*
2. *Melalui kegiatan KBIK mengidentifikasi seluruh kegiatan yang menjadi target program seperti review RPLP, inputan data sim maupun DED.*

PEMKAB USULKAN PULAU BUNGIN SEBAGAI LOKASI DAK INTEGRASI

Sumbawa Besar (Suara NTB) – Pemkab Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) mengusulkan pulau terpadat dunia, Pulau Bungin sebagai lokasi DAK Terintegrasi dengan nilai bantuan Rp. 50 Miliar.



Sebagaimana disampaikan Kabid Kawasan Permukiman, Alfiansyah S.STP melalui Kasi Penataan Kawasan Permukiman, Alwan Patawari S.T, didampingi Asisten Koordinator Program KOTAKU Kabupaten Sumbawa, Nurhasanah. Usulan DAK Terintegrasi ini nantinya akan diikuti dalam “beauty countest” dalam satu kawasan. Kalau terpilih, maka Sumbawa bisa mendapatkan DAK ini pada 2023 mendatang. “Usulannya masuk tahun ini. proposalnya sedang digodok. Kalau dapat maka realisasinya nanti pada 2023,”terangnya.





Nurhasanah menambahkan, konsep DAK Terintegrasi ini, tercakup didalamnya, air minum, sanitasi hingga perumahan. Untuk penuntasan wilayah kumuh. Dengan nilai anggaran mencapai Rp. 50 Miliar.

Terkait hal ini, Tim Pokja Kabupaten Sumbawa, yang terdiri dari beberapa unsur seperti Bappeda, Dinas PRKP, Dinas PUPR, dan konsultan KOTAKU sudah turun melakukan survei lokasi usulan. Didampingi anggota DPRD Sumbawa dari Dapil IV yang kebetulan berasal dari Pulau Bungin, M. Tahir. Pada awal penentuan lokasi pun, Tim dari Kementrian juga sudah turun ke lokasi. “Pusat telah memberikan sinyal saat turun. Makanya kita masukkan proposal,” kata Alwan. (arn)

LESSON LEARNED :

1. *Kawasan desa Pulau Bungin menjadi salah satu Desa yang diusulkan Pemkab Sumbawa untuk lokasi DAK Integrasi 2023, karena memiliki permasalahan kumuh yang sangat kompleks.*
2. *Survey Lokasi Bersama Pokja PKP, Anggota DPRD dan Tim Kotaku adalah sebagai Langkah awal dalam usulan DAK Integrasi.*

POKJA PKP SUMBAWA GELAR RAKOR BERSAMA BPPW NTB BAHAS RENCANA KERJA TAHUN 2022 DAN SK FORUM PKP



Sumbawa Besar, Wartasamawanews.com - Bappeda Sumbawa melalui Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) menggelar Rapat Koordinasi dengan BPPW NTB dalam rangka membahas Rencana Kerja Tahun 2022 dan Pembentukan Forum PKP. Rapat Koordinasi ini dibuka oleh Kepala Bappeda yang diwakili Kepala Bidang

Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Sumbawa Ivan Indrajaya, ST. bertempat di Resto Alifa Labuan Sumbawa Kamis (18/11/2021).

Dalam sambutan pembukaannya Ivan menyampaikan bahwa Pokja PKP Sumbawa sejauh ini sudah melakukan rapat internal bersama anggota Pokja PKP dalam rangka membahas Rencana Kerja Tahun 2022 dan menyusun draf SK Forum PKP termasuk capaian Rencana Kerja tahun 2021, kegiatan apa saja yang sudah terealisasi dan sisanya bisa kembali dimasukkan ke dalam Rencana Kerja tahun 2022. Cetus Kabid yang murah senyum ini.

Koordinator KI Kelembagaan H. Heru Wahyono yang mewakili BPPW NTB sangat mengapresiasi Pokja PKP Sumbawa yang sampai saat ini sudah menyusun Draf SK Forum PKP dan bahkan Perda Kumuh Kab. Sumbawa Tahun 2020 sudah diterbitkan. Kami dari Tim BPPW hanya melakukan evaluasi kegiatan yang sudah berjalan di tahun 2021 saja.

H. Heru menekan kepada Pokja PKP agar unsur yang terlibat di dalam Forum PKP, tidak hanya instansi pemerintahan, tapi juga instansi non pemerintahan, LSM, Kelompok Peduli dan lain sebagainya yang dianggap perlu agar dapat berkolaborasi dalam pembangunan Kabupaten Sumbawa ke depan. Bukan saja Pembangunan baru yang diharapkan masuk dalam Rencana Kerja Tahun 2022 akan tetapi yang bersifat pemeliharaan atau perawatan pun agar bisa dimasukkan. Selain kegiatan Infrastruktur, Sosialisasi Pemberdayaan pun agar dilakukan, untuk Sosialisasi Pemberdayaan Pokja PKP bisa berkolaborasi dengan Program KOTAKU yang notabene setiap saat melakukan pemberdayaan masyarakat.

Beberapa masukan yang disampaikan oleh peserta Rakor Pokja PKP ini antara lain Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Sumbawa Ir. Syafruddin Nur menyatakan sangat berkomitmen dalam mendukung Rencana Kerja Pokja PKP khususnya dari indikator persampahan dan sanitasi. Dalam waktu dekat kami akan mengundang seluruh Camat, Kepala Desa dan Lurah untuk membahas masalah

sampah yang selama ini selalu menjadi sorotan dan juga dalam rangka mendukung program Pemerintah Provinsi terhadap Zero Waste.



Melalui Rakor ini juga kami berharap kepada BPPW NTB maupun Bappeda Sumbawa untuk memikirkan akses transportasi menuju TPA yang berada di Utan dan juga TPA yang berada di Plampang karena saat musim penghujan seperti sekarang ini Armada pengangkut sampah kami yang menuju TPA cukup kesulitan melintasi medan tersebut dikarenakan jalannya yang rusak.

Sekali lagi saya sampaikan, kami Dinas Lingkungan Hidup Sumbawa sangat berkomitmen mendukung apa yang menjadi Rencana Kerja Pokja PKP Kabupaten.Sumbawa. Cetus Kadis yang murah senyum itu.

LESSON LEARNED :

1. *Kegiatan Rakor Pokja PKP ini dalam rangka Menyusun Rencana Kerja Pokja PKP tahun 2022 dan pembentukan forum PKP,*
2. *Diharapkan agar unsur yang terlibat di dalam Forum PKP , tidak hanya instansi pemerintahan, tapi juga instansi non pemerintahan, LSM, Kelompok Peduli dan lain sebagainya*



Keberfungsian Pokja PKP

PEMKAB SUMBAWA LAUNCHING ACTION FISIK PROGRAM KOTAKU 2021

Pemkab Sumbawa melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Sumbawa menggelar launching dimulainya action fisik program KOTAKU tahun 2021, di Kelurahan Lempeh, Kecamatan Sumbawa, Selasa sore (20/04/2021).

Kadis PRKP Sumbawa, Drs. H. Burhanuddin MT.MTP disela-sela kegiatan launching menjelaskan, sesuai Kepmen PUPR Nomor 177/Kpts/M/2021 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan Infrastruktur Berbasis Masyarakat (IBM) Tahun 2021, maka Kabupaten Sumbawa NTB melalui Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) mendapatkan Alokasi bantuan dari Pemerintah Pusat dengan total anggaran mencapai Rp 900 Juta.

Anggaran tersebut untuk membantu masyarakat melalui kegiatan Cash For Work (CFW) untuk tiga Kelurahan di Sumbawa, yakni Kelurahan Samapuin, Brang Bara dan Lempeh, dimana masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 300 juta," terangnya.





Secara garis besar kegiatan CFW ini, kata Haji Bur, sapaan akrab pejabat low profil ini, bertujuan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam upaya pemulihan ekonomi nasional (PEN) dan meningkatkan daya beli masyarakat terdampak Covid-19.

Karena itu, pihaknya atas nama Pemkab Sumbawa menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada Program KOTAKU yang sudah berjalan cukup lama di Kabupaten Sumbawa dan telah membantu Pemerintah Daerah khususnya dalam bidang pembangunan infrastruktur. "Terutama dalam menuntaskan kekumuhan di tanah Intan Bulaeng ini," cetusnya.

Dalam kegiatan launching ini juga dirangkaikan dengan penyerahan dan pemakaian Alat Pelindung Diri (APD) secara simbolis kepada sejumlah tukang yang dilakukan langsung oleh Kadis PRKP Kabupaten Sumbawa, sebagai pertanda bahwa kegiatan CFW di Kabupaten Sumbawa Segera dimulai.

Pada kesempatan itu, Askot Mandiri Kabupaten Sumbawa Nurhasanah S.Pt menjelaskan bahwa metode dalam pelaksanaan kegiatan CFW ini menggunakan sistem Padat Karya, dengan menyerap tenaga kerja sebanyak 45 orang per Kelurahan. Sehingga total serapan tenaga kerja untuk 3 kelurahan sebanyak 135 orang terutama yang terdampak Covid 19.

Dengan serapan tenaga kerja yang cukup banyak tersebut diharapkan mampu membantu masyarakat yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maupun masyarakat yang kehilangan pendapatan.

Sebelum pelaksanaan pekerjaan para tenaga kerja dibekali dulu dengan kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat dalam bentuk pelatihan dan ketrampilan tukang dan lainnya.

“Oleh karena itu, atas dukungan semua pihak khususnya Pemda Sumbawa maupun masyarakat penerima manfaat pada tiga Kelurahan tersebut, kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam,” ungkap Nurhasanah.

Sementara itu, Joni Johari ST selaku Senior Fasilitator dengan komposisi TIM nya yang baru menyatakan rasa optimisnya jika pelaksanaan kegiatan CFW ini akan selesai tepat waktu.

"Apalagi kelompok penerima manfaat di tiga Kelurahan yang mendapatkan dukungan masyarakat setempat telah menyatakan siap dan berkomitmen tinggi untuk mensukseskan kegiatan program KOTAKU tersebut," pungkasnya.(KA/**).

LESSON LEARNED :

1. *Dengan dilakukannya kegiatan launching ini, maka kegiatan Cash For Work (CFW) tahun 2021 segera dimulai.*
2. *Pemkab Sumbawa mengapresiasi kegiatan CFW karena telah membantu pemerintah daerah dalam rangka pemulihan ekonomi masyarakat di masa pandemic Covid 19 ini*

OPTIMALKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT TERDAMPAK PANDEMI COVID-19 MELALUI KEGIATAN PADAT KARYA TUNAI



Pemerintah Pusat menggelontorkan anggaran Rp 900 juta tahun 2021 untuk menunjang pelaksanaan kegiatan Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) guna membantu masyarakat melalui kegiatan Cash For Work (CFW) di tiga Kelurahan di Kecamatan Sumbawa yaitu Kelurahan Samapu, Brang Bara dan Lembeh, dimana masing-masing kelurahan mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 300 juta.

Salah satu tujuan kegiatan CFW adalah memberikan bantuan tunai dalam bentuk Upah tenaga kerja kepada masyarakat terdampak Covid -19 yang mengalami Putus Hubungan Kerja



(PHK) dan masyarakat yang mengalami penurunan/kehilangan pendapatan. Selain itu di harapkan terpeliharanya aset infrastruktur melalui pemeliharaan dan perbaikan yang dibangun program KOTAKU maupun program IBM lain melalui swakelola masyarakat (BKM/LKM).

Kegiatan Padat Karya Tunai atau Cash For Work (CFW) terbukti bermanfaat dan membantu dalam menopang perekonomian warga di masa pandemi, termasuk bagi masyarakat di 3 Kelurahan Kabupaten Sumbawa.

Metode pelaksanaan kegiatan CFW menggunakan sistem Padat Karya, yang menyerap tenaga kerja sebanyak 71 orang per Kelurahan. Sehingga total serapan tenaga kerja untuk tiga kelurahan di Kabupaten Sumbawa sebanyak 215 orang terutama masyarakat yang terdampak Covid 19.

Pengembangan ekonomi lokal menjadi kunci untuk memperbaiki kondisi ketertinggalan dan ketimpangan penghidupan kelompok Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) yang umumnya dimanifestasikan oleh rendahnya kemampuan ekonomi dan akses mereka terhadap permukiman yang layak huni dan berkelanjutan. Secara umum kelompok MBR tersebut dapat bertahan hidup di kawasan permukiman kumuh dengan mengandalkan pada kegiatan usaha skala mikro dan pekerja rendahan/buruh. Pemberdayaan masyarakat adalah suatu upaya atau proses untuk menumbuhkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan masyarakat dalam mengenali, mengatasi, memelihara, melindungi, dan meningkatkan kesejahteraan mereka sendiri.

Salah Satu bentuk Transparansi dan Akuntabel dalam pertanggungjawaban dana Program KOTAKU adalah penyerahan



pembayaran upah tenaga kerja secara langsung oleh Lurah disaksikan oleh Babinsa dan Babinkamtipmas serta seluruh Tim KOTAKU.

Inaq Sahri salah seorang pekerja saat di wawancarai wartawan media, mengaku sangat bersyukur dengan adanya program KOTAKU karena bisa membantu ekonomi kami dalam bulan puasa ini , saat ditanya kegiatan sehari-harinya ia bekerja membungkus kerupuk kulit dengan upah hanya Rp. 5.000,-/hari. Dengan adanya kegiatan ini saya bisa menerima upah Rp. 475.000,-/minggu. Sekali lagi saya berterima kasih kepada KOTAKU. Tutup Inaq Sahri dengan senyumnya.



LESSON LEARNED :

1. *Dengan dana 900 juta bisa menyerap 215 tenaga kerja yang terdampak covid-19.*
2. *Penyerahan upah tenaga kerja secara langsung oleh lurah merupakan salah satu bentuk transparansi dan akuntabel.*
3. *Rasa Syukur dan terimakasih semua pekerja khususnya kaum perempuan bisa membantu ekonomi keluarga.*

PERENCANAAN TEKNIS PROGRAM KOTAKU SUMBAWA BERJALAN LANCAR



Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) Kabupaten Sumbawa, melaksanakan kegiatan “Ekspose Perencanaan Teknis” di Aula Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Sumbawa Kamis, (8/8).

Acara Ekspose ini di buka oleh Kadis PRKP Drs. H. Burhanuddin MT, M.TP di dampingi oleh Kasatker Pengembangan Kawasan Permukiman Kab. Sumbawa Yudi

Haris, SE. MT, PPK Suharto, ST dan Koordinator Program KOTAKU Kab. Sumbawa Ir. H. Yanis Mayadi. Turut hadir dalam kegiatan Ekspose ini juga Lurah Bugis, Lurah Umasima, Lurah Seketeng, BKM, KSM serta seluruh Fasilitator Kabupaten Sumbawa.

Kadis PRKP H. Bur dalam sambutannya menyampaikan bahwa Program KOTAKU di Sumbawa sudah berjalan dari tahun 2016 dan sudah banyak membantu Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa.

Sumbawa khususnya dalam mensukseskan Nawacita Pemerintah untuk menuntaskan Program 100-0-100. Sekali lagi sy sangat apresiasi dengan keberadaan KOTAKU di Sumbawa dalam hal penuntasan

Kumuh. Ditambah lagi Kolaborasi Program RP2KPKP yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB, dimana tahun 2017 sudah dilaksanakan di Kawasan Jempol kemudian tahun 2018 kawasan Lembi dan tahun 2019 yang sedang dikerjakan saat ini yakni Kawasan Pubara.

"Oleh karena itu, agar selalu kita jaga kebersihan lingkungan," demikian H. Bur.

Yudi Haris selaku Kasatker Kab. Sumbawa menambahkan bahwa Direktur Pengembangan Kawasan Permukiman telah menyepakati agar program 100-0-100 dapat dituntaskan sesuai rencana. Program KOTAKU di Sumbawa tahun 2018 sempat vakum kemudian tahun ini kembali mendapatkan Alokasi sebesar 3 M. Terkait dengan itu sesuai yang diamanahkan Direktur PKP bahwa Pemda sebagai nahkoda bisa memandu program KOTAKU.

"Karena telah diamanahkan, maka kami di Pemerintah Daerah dalam hal ini Bidang Kawasan Permukiman Dinas PRKP Sumbawa siap mendukung dan mensupport segala bentuk kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Program KOTAKU baik dalam bentuk Incash maupun Inkind. Ungkap," Yudi Haris.

Ir. H. Yanis Mayadi dalam paparannya menyampaikan bahwa Surat Penetapan Daftar Lokasi telah terbit sejak tanggal 8 Juli 2019 yang lalu yang telah menetapkan 3 Kelurahan penerima BPM di Kabupaten Sumbawa.

Lanjut H Yanis bahwa ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan kegiatan antara lain Estetika dan perubahan wajah permukiman di lokasi kegiatan, Implementasi penyelenggaraan infrastruktur skala lingkungan harus terintegrasi dengan infrastruktur skala kawasan serta tidak memanfaatkan dana BPM pada kegiatan Penyediaan Sambungan Rumah (SR) untuk Air Minum, SR Air Limbah, Motor Sampah, Motor Pemadam Kebakaran, APAR. Dengan kata lain kegiatan yang tidak bisa di cover oleh KOTAKU.

Ir. H. Yanis berharap Pemerintah Daerah bisa mengalokasikan atau mendukung kegiatan BPM tahun 2019.

Ditambahkan Fasilitator Urban Planer Salihin, ST, bahwa untuk Dokumen Teknis tahun 2019 ini harus mencakup Pra Design di dalamnya. Kemudian Elemen Design pada perancangan lingkungan antara lain Tanaman Bunga (apotik hidup), Obyek Bermain (taman bermain), Penunjuk Arah (sign information), Obyek Seni dan lampu jalan.

Enk Fasilitator UP akrab disapa mengingatkan pentingnya berkolaborasi dalam mensukseskan kegiatan BPM ini.

PPK Program KOTAKU Suharto, ST di akhir acara mengingatkan kepada seluruh Lurah, BKM dan KSM untuk sama-sama mengawasi pelaksanaan pekerjaan agar berjalan sesuai Perencanaan.

Khusus untuk kegiatan jalan lingkungan Suharto menekankan kepada teman-teman fasilitator agar bisa berkoordinasi dengan Kabid Kawasan Permukiman agar kegiatannya nanti tidak tumpang tindih dengan program Dinas. Tutup Harto. (ARI)

LESSON LEARNED :

1. *Melalui kegiatan “Ekspose Perencanaan Teknis” program KOTAKU, Pemda Sumbawa sangat mengaapresiasi keberadaan KOTAKU di Sumbawa dalam hal penuntasan Kumuh. Ditambah lagi Kolaborasi Program RP2KPKP yang ada di Balai Prasarana Permukiman Wilayah NTB*
2. *Dalam kegiatan “Ekspose Perencanaan Teknis” ini, tim KOTAKU memaparkan proses dan mekanisme pelaksanaan kegiatan KOTAKU*

LEBIH HIDUP DISKUSI TEMATIK, WEBINAR KOTAKU SUMBAWA

Sumbawa Besar, – Tak dapat dipungkiri hingga kini telah terjadi pembelajaran, inisiatif dan hasil-hasil kolaborasi yang cukup baik dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku). Hal ini bisa dilihat dari beberapa lokasi yang telah dan sudah membangun kampung, menata kotanya menjadi layak huni tanpa bertumpu



pada anggaran program, Luar biasa !!. Dua kata ini layak disematkan kepada para narasumber dari Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di lokasi Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang berbagi pengalamannya dalam Webinar Berbagi Pengalaman KPP melalui video conference Zoom yang digelar pada Kamis, 12 Juli 2020. Di Kantor KOTAKU Sumbawa

Besar, Webinar gratis ini juga disiarkan secara langsung (livestreaming) melalui channel YouTube. Sambutan peserta juga sangat luar biasa.

Di antara peserta webinar, terdapat para team leader Program Kotaku mulai pusat hingga provinsi se-Indonesia. Hadir pula para koordinator kota (korkot) dan personel Program Kotaku se-Indonesia,

anggota badan keswadayaan masyarakat (BKM), anggota kelompok swadaya masyarakat (KSM), pemerintah daerah dari berbagai kabupaten/kota, dan sebagainya.

Tak lupa pula dari Tim Kelurahan Brang Bara Sumbawa Besar, juga ikut andil dalam Webinar tersebut, mereka adalah Sekretaris Kelurahan Brang Bara Putera Wijaya Ningrat, S.AP dan Kasie EkBang Herlin Efendi, S.AP. "Dalam Webinar tersebut Tim kelurahan, memaparkan potensi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim KOTAKU Kabupaten Sumbawa, serta keberhasilan KOTAKU yang telah memperindah Kawasan daerah bantaran kali Brang Bara yang dulunya terlihat kumuh, sekarang sejak hadirnya program KOTAKU di daerah kami, menjadi indah dan bersih tanpa kesan kumuh" ujar Herlin dan Putera Wijaya bersamaan. Koordinator Program KOTAKU Kabupaten Sumbawa, Ir. Yanis Mayadi mengatakan "Kegiatan ini dilaksanakan agar bisa saling bertukar Informasi dan pengalaman diantara Kelompok Pemanfaat dan Pemelihara (KPP) di seluruh Indonesia," ujar Yanis akrab disapa. **

LESSON LEARNED :

1. *Melalui kegiatan .webinar program KOTAKU Tim kelurahan Brang Bara yang turut hadir, memaparkan potensi dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim KOTAKU Kabupaten Sumbawa, serta keberhasilan KOTAKU yang telah memperindah Kawasan daerah bantaran kali Brang Bara yang dulunya terlihat kumuh, sekarang sejak hadirnya program KOTAKU.*